



Kemendikdasmen
BGTK DKI Jakarta

RENCANA STRATEGIS BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (BGTK) PROVINSI DKI JAKARTA



Bgp Dki Jakarta



BGTK DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt - Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyajikan Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2025-2029 ini. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru kemendikdasmen, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, serta pengawas sekolah.

Rencana Strategis merupakan dokumen utama yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pembangunan pada bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dokumen ini juga menjadi pedoman penting bagi pelaksanaan kinerja organisasi, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program kerja tahunan yang menjadi dasar untuk evaluasi capaian program dan kegiatan selama lima tahun.

Seiring berjalannya waktu, Rencana Strategis ini akan dikaji ulang secara berkala untuk disempurnakan, dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal serta capaian target tahunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan, guna memastikan bahwa Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta dapat terus relevan dengan perkembangan masyarakat serta tantangan zaman.

Jakarta, 9 Februari 2026

Kepala BGTK Provinsi DKI Jakarta



Erfan Agus Munif, S.Pd., M.Pd

NIP. 197105211997021004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DKI JAKARTA**

Jl.Gardu No. 10RT.10/RW.2, SrengsengSawah Kecamatan Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Kinerja 1	Error! Bookmark not defined. 3
C. Sasaran Kinerja 2	Error! Bookmark not defined. 4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BGTK PROVINSI BALI	6
A. Visi, Misi, dan Tujuan BGTK Provinsi DKI Jakarta	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	10
A. Arah Kebijakan dan Strategi	10
B. Arah dan Kebijakan Strategi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.....	11
C. Kerangka Regulasi	13
D. Kerangka Kelembagaan	15
E. Pengelolaan Sumber Daya BGTK Provinsi DKI Jakarta.....	17
F. Reformasi Birokrasi	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
A. Target Kinerja	26
B. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja BGP Provinsi DKI Jakarta 2022-2024	2
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	7
Tabel 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	9
Tabel 4. Kerangka Regulasi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Sumber Daya Manusia di BGTK Provinsi DKI Jakarta	18
Tabel 6. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BGTK Provinsi DKI Jakarta	19
Tabel 7. Luas Tanah BGTK Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 8. Gedung dan Bangunan BGTK Provinsi DKI Jakarta	22
Tabel 9. Data Kendaraan Dinas BGTK Provinsi DKI Jakarta.....	23
Tabel 10. Target Kinerja Balai GTK Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	26
Tabel 11. Kerangka Pendanaan.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita ini menjadi landasan utama bagi setiap agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pembangunan SDM juga mencakup pembentukan karakter yang berakhlak mulia, beretika, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta memiliki semangat kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan SDM merupakan sebuah rangkaian upaya yang berkesinambungan dan terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan agar mampu menghadapi tantangan zaman.

Upaya ini sejalan dengan besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yaitu “Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dalam kerangka visi tersebut, pendidikan memegang peran strategis sebagai tulang punggung transformasi sosial guna mencetak manusia Indonesia yang unggul. Menanggapi arah pembangunan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merumuskan arah kebijakan prioritas guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kebijakan tersebut meliputi percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel, hingga penguatan pendidikan vokasi, produktivitas tenaga kerja, dan pelestarian kebudayaan.

Dalam kerangka inilah disusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 yang mengalami perubahan nomenklatur dari Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 5 Tahun 2025, dokumen ini sebagai acuan perencanaan jangka menengah. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang GTK, BGTK Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengembangan dan

pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BGTK juga memiliki mandat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pengembangan dan pemberdayaan yang dijalankan, sehingga setiap program tidak hanya berorientasi pada *output*, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.

BGTK Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya pada tahun 2022-2024 bernama Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi DKI Jakarta, pada rentang tahun tersebut seluruh target capaian pada Rencana Strategis periode 2022-2024 telah berhasil dicapai.

Adapun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan BGP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja BGP Provinsi DKI Jakarta 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
			2025	
1	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan			
1.1	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi (PKG BK)	Orang	390	
1.2	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran (Pelatihan PM)	Orang	282	
1.3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru (Tiga Tenaga Kependidikan)	Orang	309	
1.4	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi (HGN dan Pelatihan Matematika Gembira)	Orang	291	
2	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi DKI Jakarta			
2.1	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi DKI Jakarta	Nilai	92,31	Sangat Baik
2.2	Predikat SAKIP BGP Provinsi DKI Jakarta	Predikat	A	A

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat dilihat terdapat 2 Sasaran Kegiatan (SK) dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Adapun target capaian setiap tahun sejak 2025-2029 pada IKK 1.1 diharapkan terus meningkat berturut-turut dari 1.37% hingga 2.58% guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran pada akhir periode Renstra di tahun 2029. Data dasar yang dijadikan tolak ukur adalah jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 125. 688 orang berdasarkan data Dapodik Terbaru per tanggal 28 Januari 2026.

Sasaran Kinerja 1

Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan Sesuai dengan arah dan kebijakan strategi Ditjen GTK-PG dalam rangka mendukung penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, maka Balai GTK Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen GTK-PG turut serta dalam program transformasi guru dan tenaga kependidikan. Untuk mengukur tingkat ketercapaian program ditetapkan 1 indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran adalah mereka yang telah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengajar dan mendidik siswa. Program ini bertujuan untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan dapat memperoleh :

- Pelatihan dan pengembangan profesional: Pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan mendidik siswa.

[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran.

Pengembangan kurikulum: Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

- Penggunaan teknologi: Pelatihan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- Mentorship dan coaching: Kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan dari mentor atau coach yang berpengalaman.
- Komunitas belajar: Kesempatan untuk bergabung dengan komunitas belajar yang memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk berbagi pengalaman

dan pengetahuan. Dengan demikian, guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengajar dan mendidik siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Sasaran Kinerja 2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1 adalah Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BGTK DKI Jakarta dengan predikat minimal Sangat Baik, yaitu ukuran kinerja pengelolaan anggaran yang mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian output dan Sasaran Kegiatan. Pengukuran NKA disusun dari dua komponen utama, yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Renstra tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025, yang kemudian diturunkan ke dalam regulasi teknis melalui Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025. Penyusunannya mengikuti petunjuk teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga dan akan menjadi arah kebijakan, strategi, serta acuan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Secara strategis, ruang lingkup Renstra BGTK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 mencakup lima bidang utama. Pertama, perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan. Kedua, penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan. Ketiga, pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui penguatan kepemimpinan pembelajaran, manajemen sekolah, serta supervisi akademik dan manajerial. Keempat, pemantauan, evaluasi, dan keberlanjutan program agar setiap kebijakan berbasis bukti dan berdampak jangka panjang. Kelima, penguatan tata kelola dan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, serta dunia usaha dan industri.

Dengan ruang lingkup tersebut, dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program BGTK Provinsi DKI Jakarta,

baik untuk memastikan kesinambungan program yang telah berjalan, maupun untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan pendidikan. Renstra ini juga diarahkan agar dapat mengantisipasi perubahan besar yang dihadapi dunia pendidikan, termasuk pergeseran paradigma pembelajaran, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta pendidikan bermutu untuk semua, sehingga peran BGTK Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BGTK PROVINSI DKI JAKARTA

A. Visi, Misi, dan Tujuan Balai GTK Provinsi DKI Jakarta

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki mandat strategis dalam pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025, BGTK bertugas menyelenggarakan layanan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan nyata, berbasis data, serta berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) pendidikan di tingkat provinsi, BGTK Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pelatihan, pendampingan, supervisi, serta pembinaan guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan inovatif dan kontekstual. Selain itu, BGTK Provinsi DKI Jakarta juga mengelola pemetaan kompetensi GTK, menyediakan sistem monitoring dan evaluasi program, serta mendukung transformasi pembelajaran melalui integrasi teknologi digital.

Selain itu, komitmen Balai GTK Provinsi DKI Jakarta juga berupaya mewujudkan profil Aparatur Sipil Negara (ASN) pendidikan yang profesional, adaptif, dan kolaboratif, BGTK Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM fungsional (Widyaiswara, PTP), serta jejaring kemitraan dengan dinas pendidikan dan satuan pendidikan. BGTK Provinsi DKI Jakarta juga berperan sebagai laboratorium perubahan yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional, serta mengembangkan model-model layanan pendidikan yang dapat direplikasi oleh lembaga sejenis baik di daerah maupun secara nasional. Dalam mendukung tugas tersebut, Arah kebijakan dan perencanaan strategis Balai GTK Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG). Adapun visi Ditjen GTKPG) Tahun 2025-2029, yaitu: "Terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas dalam rangka mendukung Visi Kemendikdasmen yaitu terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Adapun Misi BGTK DKI Jakarta Balai GTK Provinsi DKI Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengacu kepada misi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru yang melaksanakan 2 misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yaitu: Mewujudkan guru dan tenaga kependidikan berkualitas yang didukung dengan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang baik ; Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya guru dan tenaga kependidikan berkualitas.

Tujuan Strategis BGTK DKI Jakarta merupakan jabaran dari visi dan misi Balai GTK DKI Jakarta. Tujuan strategis tersebut menjadi dasar pengukuran capaian kinerja Balai GTK Provinsi DKI Jakarta dalam periode perencanaan, yaitu (1) meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan dan (2) meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi DKI Jakarta. Keterlaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat berdasarkan sasaran dan indikatornya.

B. Sasaran dan Indikator

Adapun tujuan strategis beserta indikator kinerja yang ditetapkan oleh Balai GTK Provinsi DKI Jakarta disajikan sebagai berikut:

Tabel 2: Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan
1	[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi DKI Jakarta	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal sangat baik
		[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi DKI Jakarta

Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) harus selalu berorientasi pada hasil akhir (*outcome*) yang akan dicapai tentunya harus dengan komitmen yang tinggi. Wujud komitmen ini ditunjukkan melalui:

1. **Pendistribusian Tanggung Jawab:** Balai GTK Provinsi DKI Jakarta memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang merata (terdesentralisasi) dengan membentuk Tim Kerja, sehingga menciptakan alur kerja yang efisien dan tidak terpusat.
2. **Akuntabilitas Personel:** Balai GTK Provinsi DKI Jakarta menjamin pertanggungjawaban individu melalui penetapan Perjanjian Kinerja bagi Pimpinan dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh unsur pegawai. Ini adalah mekanisme formal untuk mengikat kinerja individu terhadap pencapaian sasaran kegiatan balai.
3. **Manajemen Risiko dan Peluang:** Balai GTK Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kemampuan untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian, sekaligus mengidentifikasi peluang yang dapat mendukung kesuksesan organisasi.
4. **Keterhubungan Perencanaan:** Seluruh kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan erat antara perencanaan dan hasil yang dicapai, demi memastikan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.

Agar sasaran kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai, maka dirumuskan tahapan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai tahapan capaian tiap tahunnya. Sasaran kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Berikut penjabaran indikator kinerja kegiatan beserta target setiap tahunnya yang dimiliki oleh Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai GTK Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Balai GTK Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029. Capaian kinerja Balai GTK Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui revidi internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan. Balai GTK Provinsi DKI Jakarta telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran,

peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Balai GTK Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3: Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target	Realisasi
1	[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.37	1.59
2	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi DKI Jakarta	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal sangat baik Sangat Baik Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal	A	Belum dilakukan penilaian

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sebagai penjabaran dari pedoman pembangunan nasional tertinggi. Pedoman tersebut merujuk pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari **Asta Cita** yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkokuh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4 dan Prioritas Nasional 8

B. Arah dan Kebijakan Strategi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta

Arah dan kebijakan strategi yang disusun Balai GTK Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan tata kelola Kementerian guna mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Kompetensi dan Profesionalisme Guru

Balai GTK Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) agar mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif.

- **Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berkelanjutan:** Melaksanakan program peningkatan kualifikasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi untuk memperkuat penguasaan pengetahuan dan praktik mengajar guru.
- **Fokus pada Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*):** Melatih GTK untuk menerapkan pendekatan Pembelajaran Mendalam yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis, sehingga peserta didik mencapai pemahaman yang bermakna dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Inovasi dan Relevansi Pembelajaran

Kebijakan Balai GTK Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk memastikan pembelajaran relevan dengan tuntutan zaman.

- **Inovasi Pembelajaran:** Mendorong pengembangan inovasi pembelajaran yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, termasuk integrasi Koding dan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran.
- **Literasi dan Numerasi:** Mengimplementasikan program penguatan literasi dan numerasi sebagai fondasi utama peningkatan mutu pendidikan.
- **Penghargaan GTK:** Memberikan apresiasi dan anugerah kepada GTK sebagai suatu motivasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Membangun Ekosistem Pembelajaran yang Kondusif

Balai GTK Provinsi DKI Jakarta berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara merata.

- **Penguatan Guru dan Tenaga Kependidikan:** Meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan agar mampu menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan.
- **Pelopop Komunitas Belajar:** Mendorong GTK untuk merintis, memprakarsai, dan menggerakkan Komunitas Belajar sebagai wadah bagi guru untuk belajar sepanjang hayat dan berbagi praktik baik.
- **Kemitraan Mutu:** Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Bali dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang menitik ke permasalahan nyata di lapangan, sehingga memastikan pelayanan pendidikan

yang bermutu untuk semua. Juga melakukan kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga pelatihan guru di Jakarta (P4 di 5 wilayah DKI Jakarta).

4. Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran

Kebijakan utama Balai GTK Provinsi DKI Jakarta adalah memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam pelaksanaan program prioritas nasional.

- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- Pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai peraturan yang berlaku;
- Menyusun laporan kinerja secara berkala dan menyediakan informasi kepada publik (transparansi) sebagai bentuk akuntabilitas organisasi publik.

5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Publik

- **Penerapan Zona Integritas (ZI WBK/WBBM):** Berupaya membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).
- **Peningkatan Kualitas Layanan:** Terus melakukan perbaikan dalam pemberian layanan publik, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan GTK.
- **Penguatan SDM Internal:** Melakukan pelatihan internal bagi pegawai Balai GTK Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kompetensi dalam tata kelola program, administrasi, dan pemanfaatan teknologi.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai GTK Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada kerangka regulasi Kemendikdasmen 2025-2029. Kerangka regulasi pada Renstra Balai GTK Provinsi DKI Jakarta merupakan gambaran umum rencana peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kerangka regulasi ini juga menjelaskan peran peraturan tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4. Kerangka Regulasi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta

No	Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
1	Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis	1. UPT bukan lagi sekadar penyelenggara pelatihan administratif, melainkan pusat keunggulan. Fokusnya meliputi:

	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	a. Pengembangan Kompetensi: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis data kebutuhan lapangan. b. Kemitraan: Membangun kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan komunitas belajar dan Lembaga pelatihan guru dan tendik. c. Pemantauan dan Evaluasi: Menjamin bahwa program peningkatan kualitas GTK berdampak langsung pada hasil belajar murid di kelas. 2. Arah regulasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan pemerataan kualitas guru di Indonesia. Dengan tata kerja yang baru, diharapkan: a. Respon terhadap masalah guru di daerah menjadi lebih cepat. b. Program nasional memiliki eksekutor yang kuat di tingkat daerah. c. Pengelolaan data GTK menjadi lebih terintegrasi untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti.
2	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	1. Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 2. Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain: a. Syarat bakal calon kepala sekolah b. Penyiapan bakal calon kepala sekolah c. Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah

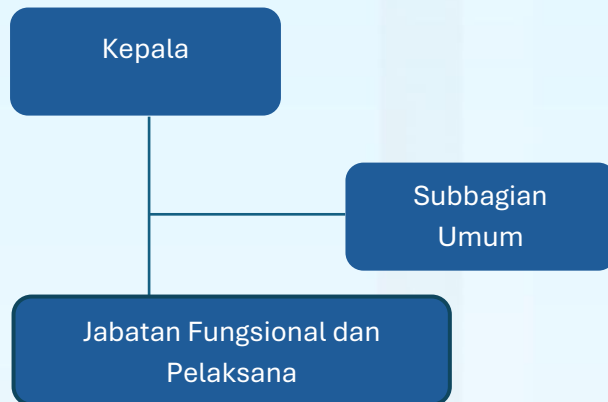
		d. Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah e. Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah f. Tugas dan beban kerja kepala sekolah g. Pengembangan kompetensi kepala sekolah h. Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah Indonesia di luar negeri i. Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah
3	Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang Pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya

D. Kerangka Kelembagaan

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi BGTK DKI Jakarta adalah satuan kerja unit pelaksana teknis setingkat Eselon 3 (tiga) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG). BGTK Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil transformasi kelembagaan dari Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi DKI Jakarta, yang keduanya berada dibawah naungan Dirjen GTKPG. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 mengatur klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (Balai Besar GTK), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (Balai GTK), serta Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (Kantor GTK). Dalam klasifikasi tersebut, BGTK Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Ke depan semoga dapat masuk klasifikasi menjadi Balai Besar GTK DKI Jakarta.

BGTK Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 5 wilayah, yaitu. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 5 wilayah kota/kabupaten yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, struktur organisasi BGTK Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada gambar di bawah.



Terlihat pada Gambar 1, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, BGTK Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan penyelenggaraan program. Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Selain itu, terdapat kelompok jabatan Fungsional yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai keahlian masing-masing dan berperan mendukung pelaksanaan tugas BGTK Provinsi DKI Jakarta, serta jabatan pelaksana yang membantu penyelenggaraan tugas administrasi dan layanan teknis di lingkungan BGTK Provinsi Bali. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Erfan Agus Munif, S.Pd., M.Pd., sedangkan jabatan Kepala Subbagian Umum dipercayakan kepada Dudi R Muharam, M.Si., yang resmi mulai mengemban tugas sejak pelantikan pada 11 September 2025. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana lebih lengkap akan dijabarkan pada pengelolaan sumber daya BGTK Provinsi DKI Jakarta.

BGTK Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan di wilayah

Provinsi Bali. Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas tersebut, BGTK Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsinya yang beracuan pada Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025. Melalui struktur organisasi dan kepemimpinan tersebut, BGTK Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu melaksanakan peran strategis dalam meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan jejaring serta komunitas belajar, serta memastikan layanan pengembangan kompetensi GTK di wilayah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

E. Pengelolaan Sumber Daya BGTK Provinsi DKI Jakarta

BGTK DKI Jakarta didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan yang dimaksudkan adalah penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

BGTK DKI Jakarta sesuai dengan Permendikdasmen No. 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas BGTK DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

6. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi.

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan balai.

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibutuhkan dukungan SDM aparatur yang memadai. Pegawai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi DKI Jakarta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang telah memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIP) yang memiliki instansi induk di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi DKI Jakarta didukung oleh ... orang pegawai, yang terdiri atas ... orang PNS dan ... orang PPPK.

Tabel 5. Sumber Daya Manusia di BGTK Provinsi DKI Jakarta

I. JABATAN STRUKTURAL	PERSONIL
Kepala	1 orang
Kasubbag Umum	1 orang
II. JABATAN FUNGSIONAL	PERSONIL
Widyapra Ahli Pertama	0 orang
Widyaiswara Ahli Muda	6 orang
Widyaiswara Ahli Madya	11 orang
Widyaiswara Ahli Utama	0 orang
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	0 orang
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	3 orang
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	0 orang
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0 orang
Penata Laksana Barang Terampil	1 orang
III. JABATAN PELAKSANA	PERSONIL
Pengadministrasi Perkantoran	3 orang

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2 orang
Pengolah Data dan Informasi	- orang
Penelaah Teknis Kebijakan	9 orang
Operator Layanan Operasional	1 orang
JUMLAH ASN	39 orang
IV. PPPK	PERSONIL
Penata Layanan Operasional	... orang
Pengelola Layanan Operasional	... orang
Operator Layanan Operasional	... orang
Pengadministrasi Perkantoran	... orang
JUMLAH PPPK	... orang
JUMLAH KESELURUHAN	... orang

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil (ASN PNS) sejumlah ... orang dan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) sejumlah ... orang. Berdasarkan dokumen Peta Jabatan BGTK Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat kekurangan personil ASN baik PNS dan PPPK sejumlah 39 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BGTK Provinsi DKI Jakarta

No.	Jabatan	+/-	2025		2026		2027		2028		2029	
			-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Kepala BGTK Prov. DKI Jakarta											
2	Kepala Subbagian Umum BGTK Prov. DKI Jakarta											
3	Arsiparis Ahli Pertama											
4	Pranata SDM Aparatur Penyelia											
5	Pranata Keuangan APBN Mahir											
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama											
7	Arsiparis Penyelia											
8	Penata Laksana Barang Terampil											
9	Pranata SDM Aparatur Mahir											
10	Arsiparis Mahir											
11	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi											
12	Penata Layanan Operasional #20											
13	Penelaah Teknis Kebijakan											
14	Pranata SDM Aparatur Terampil											
15	Arsiparis Terampil											
16	Pengelola Layanan Operasional											
17	Pengolah Data dan Informasi											
18	Pengelola Layanan Operasional#20											

No.	Jabatan	+/-	2025		2026		2027		2028		2029	
			-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
19	Pengadministrasi Perkantoran#20											
20	Operator Layanan Operasional#20											
21	Pengadministrasi Perkantoran											
22	Operator Layanan Operasional											
23	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya											
24	Widyaiswara Ahli Madya											
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda											
26	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda											
27	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda											
28	Perencana Ahli Muda											
29	Widyaprada Ahli Muda#19											
30	Arsiparis Ahli Muda											
31	Widyaiswara Ahli Muda											
32	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama											
33	Perencana Ahli Pertama											
34	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama											
35	Widyaiswara Ahli Pertama											
36	Pranata Komputer Ahli Pertama											
37	Pranata Komputer Penyelia											
38	Pranata Komputer Mahir											
39	Pranata Komputer Terampil											
40	Statistisi Ahli Pertama											
41	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama											
42	Asisten Perpustakaan Terampil											
43	Pustakawan Ahli Pertama											
44	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama											
Total												

Keterangan:

P (Pensiun), **M** (Mutasi), **PH** (Pemberhentian), **XP** (Ex-promosi), **C** (CASN), **PR** (Promosi)

Diharapkan melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dapat memenuhi kebutuhan ASN PNS pada BGTK Provinsi DKI Jakarta agar sesuai dengan Peta Jabatan.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja aparatur negara dan mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia (*world class governance*), maka perlu adanya nilai-nilai dasar (*core values*) yang berlaku untuk seluruh ASN. Hal ini diatur dalam **Undang-Undang**

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 dan 4. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

- 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- 3) melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

- 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
- 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

- 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) membantu orang lain belajar; dan
- 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

- 1) menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
- 2) suka menolong;
- 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

- 1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- 2) menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara;
- 3) menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

- 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;

3) bertindak proaktif.

7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

- 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selain itu, nilai-nilai ini ditetapkan secara resmi melalui **PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2021**, sebagai dasar pembentukan budaya kerja ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Tujuannya adalah agar ASN menjadi pelayan publik yang efisien, melayani dengan hati, dan siap menghadapi tantangan zaman.

2. Fasilitas Balai

BGTK Provinsi DKI Jakarta, telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi pelayanan, penyelenggaraan dan pengembangan program. Fasilitas tersebut berupa lahan, gedung maupun sarana pendukung lainnya, untuk dapat menjalankan tugas pokoknya. Meskipun demikian, guna lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Balai GTK Provinsi DKI Jakarta terus berbenah diri untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti gedung asrama yang layak, *Guest House*, dan peralatan penunjang lainnya. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Balai dalam rangka menyelenggarakan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut.

a. Tanah

Tabel 7. Luas Tanah BGTK Provinsi DKI Jakarta

No	Aspek	Keterangan	
1	Luas Tanah	 m ²	Nomor : Dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional
2	Status	Milik Sendiri	
3	Sertifikat	Hak Milik	

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 8. Gedung dan Bangunan BGTK Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis	Lantai	Jumlah	Kondisi
1	Gerbang Muka	1	1	Baik
2	Gedung Kantor NH Dini	2	1	Baik
3	Gedung Aula HB Yasin	1	1	Baik
4	Gedung Kelas Amir Hamzah	1	12	Baik

No	Jenis	Lantai	Jumlah	Kondisi
5	Ruang Makan	1	1	Baik
6	AULA Utama	1	1	Baik
7	Musholla	1	1	Sedang
8	Rumah Jabatan Kepala Balai	2	1	Baik
9	Guest House (Mawar)	2	1	Baik
10	Asrama	2	1	Sedang
11	Asrama	2	1	Sedang
12	Asrama	2	1	Sedang
13	Gazebo	1	1	Baik
14	POS Satpam	1	1	Baik

c. Kendaraan Operasional

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Balai, BGTK Provinsi DKI Jakarta didukung oleh kepemilikan kendaraan operasional baik roda 4 maupun roda 2. Adapun kendaraan operasional yang dimiliki oleh BGTK Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Data Kendaraan Dinas BGTK Provinsi Bali

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4 - Avansa 1.3G	1	Rusak
2	Kendaraan Roda 4 - Kijang Innova (Reborn Type G)	1	Baik
3	Kendaraan Roda 4 - Toyota Sedan	1	Baik
4	Kendaraan Roda 2 -		Baik
5	Kendaraan Roda 2 Sepeda Listrik	1	Baik

d. Sarana BGTK Provinsi DKI Jakarta

Sarana lain yang tidak kalah pentingnya dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran dan operasional administrasi kantor adalah komputer dan seluruh kelengkapannya. Sarana ini sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

F. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Balai GTK Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen. Reformasi birokrasi memiliki tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik:

1. Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi;
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
3. Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas.

Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7 (tujuh) tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025-2029 menekankan dua dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Penguatan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional. Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan

mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak (*impactful bureaucracy*), tidak hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan. Arah reformasi birokrasi ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Balai GTK Provinsi DKI Jakarta. Pada tingkat UPT Balai GTK Provinsi DKI Jakarta menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) untuk mendukung tercapainya Sasaran Program Ditjen GTKPG dan Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 10. Target Kinerja Balai GTK Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Sasaran Program	Uraian IKK	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan.						
1.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	%	1,37	1,61	2,21	2,41	2,58
2	Meningkatnya tata Kelola Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.						
2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran Program	Uraian IKK	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	Rangkaian Pelatihan Pengembangan Kompetensi Guru BK untuk Fasda.
		Pelatihan Kompetensi GTK untuk Inovasi Pembelajaran, PKG Guru Bahasa Inggris, PKG MIPA/PISA.
		Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam
		Pelaksanaan Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial
		Rangkaian Pelaksanaan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
		Pelatihan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan (TAS, Laboran, dan Perpustakaan).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan
		Pelatihan Literasi, Numerasi, dan Sains. Meliputi pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak dini, dan peningkatan kecakapan literasi.
		Pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional
Meningkatnya tata Kelola Balai GTK Provinsi DKI Jakarta.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal sangat baik	1. Pengelolaan BMN 2. Pengelolaan Kepegawaian 3. Pelaksanaan SAKIP 4. Penyusunan dan Perencanaan ZI-WBK
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi DKI Jakarta minimal A	

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Balai GTK Provinsi DKI Jakarta dan sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2025-2029 tertuang pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan

Kode	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
138.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	10,668,490,000	24,945,271,000	89.492.952,000	110.147.866,000	131.723.169,000
138.03.WA	Program Dukungan Manajemen	2,332,321,000	6,653,071,000	9,161,814,000	10,077,995,400	11,085,794,940

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis BGTK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan dasar yang bersifat fundamental dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pengembangan dan pemberdayaan pendidik serta tenaga kependidikan. Dokumen Renstra ini disusun dengan tetap memperhatikan keselarasan (*cascading*) antara Renstra Ditjen GTKPG dan Renstra Kemendikdasmen, serta menimbang isu-isu strategis yang berkembang di Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan Renstra BGTK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dengan berlandaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka pendanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, langkah-langkah evaluatif dan korektif juga terus dijalankan guna memastikan peningkatan kualitas layanan satuan kerja secara berkelanjutan.

Dinamika perkembangan ekosistem pendidikan dan kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan tantangan sekaligus peluang yang berimplikasi pada arahan dan kebijakan pimpinan. Oleh karena itu, penyesuaian strategi pencapaian tujuan-tujuan yang tercantum dalam Renstra merupakan hal yang sangat dimungkinkan ke depannya. BGTK Provinsi Bali senantiasa berupaya mengikuti perkembangan dan arahan terbaru Ditjen GTKPG, guna memastikan keselarasan dan ketepatan langkah strategis yang ditempuh.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra BGTK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 ini, perencanaan kinerja yang dihasilkan dapat semakin berkualitas, terukur, dan berdaya guna dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.